**KEPASTIAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL - BELI TELEPON
GENGGAM (*HANDPHONE*) DI PASAR GELAP (*BLACK MARKET*)**

ABDUL RAHMAN TIBAHARY
E-mail: arie_recht@yahoo.com

Abstrak

Pada umumnya transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, namun tidak terlepas dari hal itu transaksi memerlukan suatu kepastian hukum agar tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. Seperti di zaman sekarang ini yang semakin maraknya telepon genggam (*handphone*) dengan berbagai macam jenis variasi dan harga dapat ditemui sehari-hari di toko *handphone*. Hal ini menimbulkan ide bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan bisnis jual-beli *handphone* melalui pasar gelap (*black market*) dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga normal di pasaran.

Abstract

In general, transactions can be carried out anywhere and at any time, but not apart from that the transaction requires a legal certainty so as not to cause a loss among one of the parties who made the transaction. As in today, the increasing number of handphone with various types of variations and prices can be found everyday at the handphone shop. This raises an idea for unscrupulous individuals to do business in buying and selling mobile phones through the black market at lower prices compared to the normal prices on the market.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Black Market, Transaksi Jual - Beli

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan tipe konsumen yang konsumtif. Gaya hidup yang beragam dan kemajuan teknologi menimbulkan kebutuhan hidup yang semakin bertambah. Gadget/alat elektronik yang saat ini sedang marak di Indonesia pun bermunculan di pasar Indonesia dengan berbagai macam bentuk dan fungsi. Bentuk gadget yang saat ini sedang laku di pasaran adalah *smartphone* dan tablet. Merek-merek *smartphone* yang sering di temui di pasaran seperti Samsung, Blackberry, Iphone, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan ide bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan bisnis jual-beli *handphone* melalui pasar gelap dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga normal di pasaran. Hal ini tentulah melanggar etika bisnis, karena menimbulkan kerugian bagi calon konsumen dan juga merusak harga pasar. Bisnis jual-beli *handphone* melalui pasar gelap mengakibatkan beberapa dampak sebagai berikut:

- Merugikan Negara. Karena sebagian besar pendapatan Negara Indonesia merupakan pemasukan dari bea cukai, sedangkan barang-barang di pasar gelap tidak terkena bea cukai.
- Mengganggu keseimbangan pasar, karena barang-barang ilegal cenderung lebih murah dibandingkan dengan barang yang di peroleh secara legal.

Masyarakat menjadi lupa akan norma-norma dan tata tertib yang telah di buat pemerintah bahkan telah melanggarnya, kemudian kerugian yang paling penting

adalah tanpa di sadari masyarakat yang membeli produk (pembeli) melalui pasar gelap menjadi korban para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah ikut terlibat dalam tindak jual beli yang ilegal. Atau secara tidak langsung pembeli ikut membantu melancarkan bisnis ilegal tersebut, menghambat pembangunan nasional dan merugikan Negara.

Pengertian *Black Market*

Black Market (BM) sesuai istilah yang jamak dipakai dalam hukum positif dan transaksi-jual beli kontemporer artinya adalah perdagangan *illegal*, perdagangan tidak resmi, perdagangan yang dilakukan diluar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara. Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

“Black Market is The Illegal free market which flourishes in economies where consumer goods are scarce or are heavily taxed. In the first kind, black market prices are higher than the 'official' or controlled prices. In the second kind, prices are lower than the 'legitimate' or taxed prices, due to tax evasion”

“Pasar bebas ilegal yang tumbuh subur di suatu negara yang mana barang-barang konsumsi sangat langka atau mahal karena dikenakan pajak. Pada jenis pertama, harga pasar gelap (*black market*) bisa jadi lebih tinggi dari harga 'resmi' atau yang dikendalikan oleh otoritas ekonomi negara. Pada jenis kedua, harga jadi lebih rendah dari harga 'sah' atau yang dikenakan pajak, karena penggelapan pajak.”

Kalau dari definisi diatas yang banyak terjadi di Indonesia itu ialah jenis black market yang kedua; yaitu barang ilegal yang masuk ke dalam negeri dengan

tanpa pembayaran pajak (bea). Yang awalnya barang itu mahal karena ada pajak yang dibayar, barang itu menjadi lebih murah bahkan sangat murah karena tidak terkena pajak. Walaupun memang definisi ini tidak disepakati oleh semua, akan tetapi setidaknya definisi diatas itu memang yang banyak terjadi. Kabar yang banyak beredar di media itu juga kan walaupun redaksi berbeda, akan tetapi intinya sama. Yaitu penjualan barang illegal karena tidak melewati pembayaran pajak, artinya tidak melalui jalur yang sah, yang telah ditetapkan oleh suatu Negara.

Transaksi jual-beli barang *black market* (BM) mempunyai dampak negatif pada kondisi perekonomian pada suatu wilayah (negara). Hal ini dikarenakan, disamping barang BM tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak (*tax*), barang BM juga termasuk kategori *gharar*, tidak jelas asal usulnya. Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi jual-beli termasuk sesuatu yang dibolehkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah : 275. “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Ayat ini sesungguhnya masih bersifat umum.

Karena tidak semua model transaksi jual-beli yang dihalalkan dalam syaria Islam. Sehingga ada beberapa hadits Nabi Muhammad Saw yang men-*takhsish* ayat tersebut. Ditemukan beberapa hadits Nabi yang menjelaskan transaksi jual-beli yang masuk dalam kategori dilarang untuk dipraktekkan. Beberapa transaksi jual-beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya adalah *ba'i al-gharar* (jual-beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*jahalah*)), *ba'i al-ma'dum* (transaksi jual-beli yang obyek barangnya tidak ada), *ba'i an-najash* (jual-beli yang ada

unsur penipuan), *talaqi rukban* (transaksi jual-beli yang menciptakan tidak lengkapnya informasi di pasar, karena penjualnya dihadang di tengah jalan), transaksi jual-beli pada obyek barang yang diharamkan, dan lain-lain. Adapun praktek transaksi jual-beli barang BM termasuk dalam transaksi yang dilarang, karena beberapa sebab, di antaranya adalah:

- *Pertama*, transaksi BM merupakan bentuk transaksi yang ilegal. Mengapa ilegal? Karena barang BM adalah barang yang statusnya tidak diakui di pasar. Karena masuknya ke pasar melalui selundupan, agar tidak kena bea cukai.
- *Kedua*, transaksi jual-beli BM akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang BM yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Biasanya, barang yang berstatus BM akan dijual lebih murah, dibanding dengan barang yang memang statusnya diperoleh secara legal. Rasulullah Saw melarang bentuk transaksi yang berakibat pada terganggunya mekanisme pasar. Dari sisi penawaran (*supply*), kondisi harga pasar akan terganggu. Hal ini sama dengan model transaksi *talaqi rukban* yang dilarang untuk dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. Karena efeknya sama-sama mempengaruhi mekanisme pasar.
- *Ketiga*, ajaran Islam memberikan panduan bagi umatnya untuk menggunakan barang atau produk yang halal. Produk BM termasuk dalam kategori produk yang tidak jelas (*gharar*) asal usulnya. Bisa jadi, produk BM berasal dari praktek yang dilarang dalam Islam, seperti hasil

pencurian atau penipuan dan lain-lain. Dalam hal ini, produk BM bisa kita kategorikan dalam transaksi yang *gharar* (tidak jelas) yang prakteknya dilarang dalam ajaran Islam.

Hukum Jual - Beli Melalui Black Market

Cakupan istilah pasar gelap ini cukup luas, selama perdagangan tersebut melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, maka dapat disebut sebagai suatu pasar gelap. Misalnya, barang (telepon selular) yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi perizinan untuk dapat diperdagangkan, sehingga melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar dari terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHP). Sehingga, jika telepon selular yang diperdagangkan itu diperoleh dari hasil pencurian, penyelundupan, penadahan atau diperoleh dengan cara-cara lain yang melanggar undang-undang, dapat dikatakan jual beli tersebut tidak resmi/tidak sah dan terhadap pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, telepon selular termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No : 19/M-DAG/PER/5/2009 (Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009).

Definisi produk telematika menurut Pasal 1 angka 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 adalah sebagai berikut :

“Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi.”

Telepon selular, menurut ketentuan *Lampiran I Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009*, merupakan salah satu produk yang wajib dijual dengan disertai kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Hal tersebut terkait juga pengaturan *Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009* yang menyatakan bahwa:

“Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia.”

Karena itu, terhadap penjual telepon selular yang melanggar ketentuan *Pasal 2 ayat (1) Permen 19/M-DAG/PER/5/2009* berlaku ketentuan *Pasal 22 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009* yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1], dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).”

Jika kita melihat pada ketentuan UUPK, *Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK* menyatakan bahwa seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk

penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelanggaran *Pasal 8 UUK* ini pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar (lihat *Pasal 62 ayat [1] UUPK*). Maka, berdasarkan pengaturan *Pasal 62 ayat [1] jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK* seorang penjual telepon selular yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Lebih lanjut, mengenai penuntutan berdasarkan *Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1)*.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon

Seluler Di Pasar Gelap (*Black Market*)

Menurut Johanes Gunawan, Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain :

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat Sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perUndang-Undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha

diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Sanksi Terhadap Penjualan Telepon Seluler Di Pasar Gelap (*Black Market*)

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 527 k/Pdt/2006 telah menggunakan istilah *black market* untuk menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi. Telepon seluler termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2009. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa:

“Setiap produk telematika dan elektronik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia”.

Terhadap penjual telepon seluler yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan peraturan dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK seorang penjual telepon seluler yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanitijo Soemitro, Ronny. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Semarang.
- Johanes Gunawan, Johanes. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Nasution, Az. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Tibahary, A. R. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pajak Terutang Atas Transaksi e-commerce dalam rangka mewujudkan kepastian hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*.